

KOORDINASI ANTAR TIM DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KARYA BARU KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG

Yose Fina Andini

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : yosefinaandini@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan bahwa terdapat pembangunan yang dibiayai dari alokasi dana desa yang terbengkalai atau tidak selesai pada tahun pembangunan tersebut dianggarkan. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu mulai dari penelitian kepustakaan yang meliputi pengumpulan teori-teori untuk dijadikan landasan dalam penelitian, serta penelitian lapangan yang berupa pengumpulan data secara langsung di lapangan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Tripathi dan Reddy tentang syarat-syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu kesempatan awal, kontinuitas, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan yang supervisi dan efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara keseluruhan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang ditemui, antara lain terdapat orang-orang tertentu dalam pelaksanaan alokasi dana desa yang tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, kepemimpinan kepala desa yang kurang memberikan arahan serta motivasi, serta minimnya insentif.

Kata Kunci : Koordinasi, Alokasi Dana Desa, Efektifitas

Abstract

This essay aims to identify and analyze the effectiveness of coordination among teams in the execution of funds allocation for village in Karya Baru Village Marau District in Ketapang Regency. The title is chosen based on issues that there are some developments that haven't finished by the year of funds allocation. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. This study was conducted through the steps of research such as literature research which includes collecting and obtaining the theories used as a foundation in research and field research in the form of obtaining data directly. Theory that used to analyze is from Tripathi and Reddy about some conditions to achieve effective coordination, such as first chance, continuity, formulation of authority and responsibility, effective communication, and effective leadership. The conclusion of this study is coordination in execution of funds allocation for village in Karya Baru Village has gone on well overall, but there are several obstacles, such as certain people who are not incapable of implementing their competence and responsibility, leadership of village headman which lack of giving guidelines and motivations, and a lack of incentive.

Keywords : Coordination, Funds Allocation For Village, Effectiveness

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Konsekuensi dari adanya desentralisasi kewenangan terhadap pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup, dengan kata lain disertai dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Di Desa Karya Baru, penggunaan alokasi dana desa sebagai dana bantuan dari kabupaten dimulai pada tahun 2006. Dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Baru terdapat permasalahan, yaitu data yang ada menunjukkan adanya dana yang disalurkan untuk pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, balai dusun, kantor desa, serta gedung posyandu. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan memang ada, tetapi tidak semuanya berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat pada data yang tercantum dalam lampiran, dalam tabel 1.3 pada kolom belanja langsung yang menyebutkan bahwa akan dilakukan pembangunan gedung posyandu dan balai dusun dengan anggaran sejumlah Rp 11.526.000,00 dan Rp 34.160.000,00. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dilihat pada foto-foto di lapangan pada lampiran yang menunjukkan bahwa pembangunan gedung posyandu dengan balai dusun tersebut terbengkalai.

Namun, di sisi lain pembangunan yang telah direncanakan di dalam peraturan desa

memang ada yang telah berhasil dibangun, misalnya pembangunan kantor desa yang dianggarkan pada tahun 2011, yaitu pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa biayanya sejumlah Rp 30.000.000,00, serta pembangunan jembatan di Dusun Batang Belian dengan anggaran sebesar Rp 18.390.000,00. Kemudian ada pula pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2012, yaitu pembangunan poskamling dan tugu dengan masing-masing anggaran sebesar Rp 6.500.000,00 dan Rp 6.000.000,00.

Tidak konsistennya hasil pembangunan menunjukkan fenomena tidak searahnya tindakan dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan alokasi dana desa. Fenomena tersebut seperti pelaksanaan alokasi dana desa yang dilakukan sendiri oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa tanpa berkoordinasi dengan BPD dan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa yang tidak berkomunikasi dengan LPM selaku tim pelaksana kegiatan dapat pula menyebabkan terhambatnya pembangunan. Adanya keselarasan tindakan dalam pelaksanaan alokasi dana desa sangat berhubungan dengan koordinasi yang terjadi di dalam organisasi atau tim yang mengelola alokasi dana desa. Oleh karena itu, berpijak pada data, fakta, serta fenomena yang ada, maka peneliti menulis skripsi ini dengan judul “Koordinasi Antar Tim Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang”.

2. Rumusan Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang digunakan adalah: Belum efektifnya koordinasi antar tim

dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas koordinasi yang dilakukan antar tim dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini adalah untuk menguji teori dan diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen pemerintahan, serta dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dan bahan masukan bagi pengambil keputusan di setiap tingkat pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

Selanjutnya, menurut Suwarno Handyaningrat (dalam Moekijat, 1994:6), koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usaha-usaha secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Menurut Drs. Soewarno Handyaningrat (dalam Moekijat, 1994:32) ada 2 (dua) jenis koordinasi, yaitu koordinasi intern dan koordinasi ekstern. Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal, koordinasi horisontal, dan koordinasi diagonal.

- 1) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, di mana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis. Hal ini dapat juga dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkis, karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando.
- 2) Koordinasi horisontal, yaitu koordinasi fungsional, di mana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.
- 3) Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, di mana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando.

Menurut Tripathy dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:39) ada 9 (sembilan) syarat

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel (dalam Moekijat, 1994:3) koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi secara efisien.

untuk mencapai koordinasi yang efektif, yakni:

1) Hubungan Langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung di antara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan apabila terjadi kesalahpahaman, maka akan dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

2) Kesempatan Awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri harus ada konsultasi bersama

3) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan

4) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu jangan kaku.

5) Tujuan yang Jelas

Tujuan yang jelas penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan secara efektif kepada kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

6) Organisasi yang Sederhana

Struktur yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Pelaksanaan

pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dan dapat ditempatkan di bawah beban seorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi.

7) Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab yang Jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8) Komunikasi yang Efektif

Melalui komunikasi yang efektif tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju ke pelaksanaan tujuan perusahaan yang telah ditentukan.

9) Kepemimpinan dan Supervisi yang Efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan terhadap orang-orang bawahan dan memelihara semangat kerja mereka.

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Nurcholis

(2011:89) mengungkapkan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bantuan keuangan kepada desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan terintegrasi dalam APBDesa. Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

Perencanaan partisipatif ini menunjukkan bahwa demokratisasi dan transparansi dijunjung tinggi dalam pengelolaan ADD. Demokratisasi, yaitu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT dan RW dalam perencanaan pembangunan yang dibiayai ADD. Sedangkan transparansi tercermin dari pertanggungjawaban ADD dengan menginformasikan laporan pertanggungjawaban ADD kepada masyarakat.

Untuk menunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Sedangkan sebagai pelaksana di tingkat desa dibentuk Tim Pengawas Pembangunan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Tingkat kabupaten terdiri dari:

- 1) Bupati sebagai Pembina;
- 2) Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
- 3) Kepala BPM, Pemdes, P dan K sebagai penanggungjawab;
- 4) Kabid Pemdes dan PLD/K sebagai ketua;
- 5) Kasubbid Tapem, PAD sebagai sekretaris;
- 6) Kepala BAPPEDA sebagai anggota;
- 7) Kepala Bagian Keuangan sebagai anggota;
- 8) Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;

9) Kasubbid Pengembangan dan Lembaga Desa sebagai anggota;

10) Staf Bidang Pemdes dan PLD sebagai anggota.

Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
- 2) Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan sosialisasi secara luas kepada desa dan kecamatan tentang kebijakan, data, dan informasi tentang ADD;
- 4) Memberikan bimbingan teknis/orientasi kepada Tim Pengawas Pembangunan Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- 5) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan inspektorat;
- 6) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Susunan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri atas tiga orang, yakni:

- 1) Camat sebagai ketua;
- 2) Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;

3) Kepala Seksi sebagai anggota.

Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah:

- 1) Melaksanakan sosialisasi secara luas pada desa akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- 2) Membina dan mengkoordinasikan Musrenbangdes dalam wilayah kecamatan;
- 3) Mengumpulkan data serta mengintervensi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- 4) Membantu Tim Pengawas Pembangunan Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
- 5) Melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- 6) Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati cq. Kepala BPM, Pemdes, P dan KB;
- 7) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
- 8) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD.

Susunan keanggotaan Tim Pengawas Pembangunan Desa, antara lain:

- 1) Kepala Desa sebagai penanggungjawab;

- 2) Sekretaris Desa sebagai ketua;
- 3) Kepala Urusan Pembangunan sebagai sekeretaris;
- 4) Salah satu kepala urusan sebagai anggota;
- 5) Dua orang BPD sebagai anggota.

Tugas Tim Pengawas Kegiatan ADD adalah:

- 1) Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- 3) Meminta keterangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan apabila pelaksanaan realisasi fisik di lapangan tidak sesuai dengan program kegiatan yang telah disusun di dalam APBDesa.
- 4) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Tim Pengawas Pembangunan Desa. Tim Pelaksanan Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan terdiri atas:

- 1) Ketua LPM sebagai ketua;
- 2) Sekretaris LPM sebagai sekretaris;
- 3) Bendahara LPM sebagai bendahara;

- 4) Wakil Ketua II LPM sebagai anggota;
- 5) Ketua Seksi Pembangunan, Perekonomian, Koperasi dan Lingkungan Hidup LPM sebagai anggota.

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan fisik;
- 2) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengawas Pembangunan Desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian dengan melakukan analisis. Lokus penelitian adalah Desa Karya Baru yang terletak di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Objek penelitiannya adalah koordinasi antar tim dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan PLD/K, Camat Marau, Kepala Desa Karya Baru, Bendahara Desa, Kepala Urusan Pembangunan Masyarakat Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, dan tokoh masyarakat. Oleh karena jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data melalui tiga cara, yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman dengan prosedur antara lain: reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data dengan jenis triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian yang berbeda-beda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan

dengan tiga teknik, yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Antar Tim Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

a. Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru telah melakukan kesempatan awal dengan berkoordinasi bersama semua pihak yang terlibat pada tahap perencanaan, yaitu BPD, LPM, perangkat desa, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat. Pada tahap perencanaan mereka berkumpul di Balai Dusun Pesanggaran, karena Dusun Pesanggaran belum memiliki balai dusun, maka mereka menggunakan kantor desa. Program-program yang menjadi hasil musyawarah akan dilaksanakan bergilir bagi setiap dusun.

b. Adanya kontinuitas koordinasi dapat dilihat dari tahap-tahap dalam pelaksanaan ADD, mulai dari tahap perencanaan, kepala desa bersama perangkat desa, BPD, LPM, dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan program apa saja yang menjadi prioritas, setelah program tersebut telah berbentuk perdes, kepala desa akan mengkoordinasikannya dengan Camat untuk memperoleh rekomendasi dalam rangka pencairan dana ADD, setelah mendapatkan rekomendasi maka kepala desa akan bertemu langsung dengan pihak Pemdes di Kabupaten Ketapang untuk mengajukan permohonan pencairan dana. Setelah disetujui dan ADD telah cair, maka kepala desa akan

langsung menyalurkan dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tercantum dalam perdes. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan atau sedang berlangsung, jika waktunya telah memasuki tri-wulan selanjutnya, maka proses perencanaan dengan mengadakan musyawarah untuk membuat perdes, kemudian berkonsultasi ke kecamatan untuk memperoleh rekomendasi, hingga proses permohonan pencairan ADD akan berulang kembali, begitu pula untuk tahap selanjutnya.

c. Terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut perumusan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru, salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari pihak kecamatan yang berupa memverifikasi rancangan peraturan desa dan laporan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Kurangnya pengawasan ini karena pihak yang melaksanakan ADD dari desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Bendahara Desa tidak menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini terlihat ketika pada tahap verifikasi yang harus dilakukan terhadap rancangan peraturan desa dan laporan pertanggungjawaban oleh pihak kecamatan, pihak desa tidak berkonsultasi ke kecamatan secara langsung melainkan hanya melalui *handphone*, yaitu dengan menelepon camat, sehingga setelah itu mereka bisa langsung datang kepada pihak kabupaten untuk pencairan dana tanpa verifikasi dari pihak kecamatan. Oleh

karena itu, ketika pihak kabupaten memverifikasi kembali, baik perdes maupun laporan pertanggungjawaban masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, seperti tidak menyertakan dokumen yang berupa foto-foto yang menunjukkan kemajuan program-program yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman akan wewenang dan tanggungjawab, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya mereka tidak memiliki kesadaran untuk melakukannya dengan benar dan sesuai prosedur.

- d. Komunikasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru jika dilihat dari awal perencanaan memang telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu dengan musyawarah bersama antar pemerintah desa dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan tidak rampungnya pembangunan, seperti pembangunan balai dusun dan gedung posyandu. Ketika proses pelaksanaan pembangunan berjalan, anggota LPM yang mengerjakannya hanya satu orang yang kemudian dia memutuskan untuk berhenti mengerjakan pembangunan, yaitu pembangunan gedung posyandu karena merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Bapak Te'Is selaku sekretaris LPM memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya karena merasa tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Berdasarkan observasi dan wawancara, Bapak Te'Is selaku anggota

LPM tidak mengerti mengenai ADD dan pada tahap perencanaan beliau merasa tidak pernah diundang. Beliau mengatakan bahwa pemerintah desa tidak pernah membicarakan kepadanya mengenai penunjukannya sebagai sekretaris LPM. Beliau baru mengetahui ketika ia dipanggil untuk menandatangani dokumen saat ada pemeriksaan. Di samping itu, ketika beliau memutuskan untuk menghentikan pekerjaannya, pihak desa seolah tidak peduli dan tidak memberikan arahan lebih lanjut, sehingga bangunan yang setengah jadi itu menjadi terbengkalai dan tidak terselesaikan. Mengenai tidak adanya undangan bagi Bapak Te'Is untuk menghadiri musyawarah perencanaan ADD mungkin dikarenakan Ketua LPM, yaitu Bapak Mensiran telah diundang untuk menghadiri musyawarah tersebut. Akan tetapi, peneliti tidak bisa melakukan wawancara terhadap beliau karena beliau telah meninggal dunia. Permasalahan yang diungkapkan di atas menunjukkan kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa Karya Baru dengan LPM. Tidak efektifnya komunikasi dalam pelaksanaan ADD juga terlihat ketika pemerintah desa harus berkonsultasi untuk mendapatkan rekomendasi dan verifikasi terhadap rancangan perdes dan laporan pertanggungjawaban dari pihak kecamatan.

- e. Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru jika dinilai dari hubungan pribadi dengan orang-orang yang dikoordinirnya dinilai sudah cukup baik

karena mereka tinggal di dalam lingkungan yang sama dan masih terdapat hubungan saudara dan kekerabatan di antara mereka, sehingga kepala desa bisa lebih mudah mempengaruhi orang-orang yang dikoordinirnya. Akan tetapi, dengan adanya hubungan yang dekat di antara Kepala Desa dengan orang-orang yang dikoordinirnya, muncul ketidaktegasan dalam pemberian instruksi dan peringatan sehingga terjadi beberapa pembangunan yang terbengkalai. Hal ini disebabkan oleh kepala desa yang hanya memberikan instruksi seperlunya saja sesuai dengan rencana kegiatan, dan kurang memberikan dorongan untuk memotivasi bawahannya. Selain itu, minimnya insentif juga menjadi kendala dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

2. Keterbatasan Studi

Adapun keterbatasan penelitian yang dialami peneliti selama melakukan penelitian adalah Sekretaris Desa yang menjadi salah satu informan penting sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara bersama beliau; para informan dari tim pelaksana di Desa Karya Baru sebagian besar memiliki kegiatan yang homogen dan dilakukan pada waktu yang bersamaan, yaitu dari pagi hingga sore mereka bekerja di perusahaan tambang, sehingga peneliti harus pandai-pandai membagi waktu untuk melakukan wawancara dengan para informan tersebut karena waktu luang yang mereka miliki berada pada waktu yang sama, yaitu sore hingga malam; dan terdapat kesulitan dalam pengumpulan data, khususnya mengenai profil desa karena proses

pembuatan profil desa baru berjalan dan belum selesai, sehingga data yang diperoleh peneliti hanya berupa gambaran umum yang tidak begitu detail.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Karya Baru beserta perangkatnya, BPD, LPM, dan masyarakat Desa Karya Baru, Camat Marau, serta Kepala Bidang Pemdes dan PLD/K Kabupaten Ketapang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan kemudian telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Agus. 2003. *Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor*. Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV: Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.
- Muluk, Khairul M.R. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Sugandha, Dann. 1988. *Koordinasi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Usman, Husaini. 2006. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widjaja, A.W. 1993. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: Rajawali Press.

Winardi. 2000. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

Literatur Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YOSE FINA ANDINI
NIM / Periode lulus : E42009025/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : yosefinaandini@yahoo.co.id/082157238753

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI ANTAR TIM DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
KARYA BARU KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP

7/2014
2

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 Februari 2014

Yar

(YOSE FINA ANDINI)



H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001